



PROFIL

2024



kota yogyakarta



PROFIL

2024



kota yogyakarta



▲ Peresmian gedung kantor Kematren Gondomanan oleh Pj. Walikota Yogyakarta Bapak Singgih Raharjo, S.H., M.Ed.

01

Pembina

- Agus Tri Haryono, S.T., M.T.
Plt. Kepala Dinas PUPKP
Kepala Bappeda
- Erna Susanti, S.E.
Sekretaris Dinas PUPKP

02

Penanggung Jawab

- Nini Yuniarti, S.E.
Ketua Tim Kerja PEP

03

Penyusun

- Ernita Sari Purwaningtyas, S.Ars.
- Norman Harya Mahardika, S.Ars.

TIM PENYUSUN

04

Kontributor

- Lutfi Indah Cahyani S.PWK
- Rizky Rahmawati, S.Tr.T.
- Candra Widyasari, A.Md.
- Andre Dwika Dewa Mahardika, A.Md.
- Iskandar Mustofa, S.T.
- Fenny Nursita, S.Tr.T.
- Kelvin Renato Brillianto, A.Md.
- Buyung Wendi Windaka, A.Md.T.
- Deny Setyawan, S.E.
- Diah Setiani, S.E.
- Fajar Rosnita Ariyani
- Rahmawan Kurniadi, S.T., M.Eng.

05

Fotografer

- Ernita Sari Purwaningtyas, S.Ars.
- Norman Harya Mahardika, S.Ars.
- Adhika Yudhatama, S.Si.
- Dinas Komunikasi Informasi dan Persandian



Daftar Isi

Kata Pengantar: DPUPKP dalam Pembangunan Kota Yogyakarta	05
Kota Yogyakarta	07
Sekretariat Forum OPD Perencanaan 2025	08
Bidang Penataan Bangunan Embung Giwangan: Taman Budaya dan Taman Edukasi	10
Pasar Sentul: Pasar Tradisional Masa Kini	16
Bidang Pengendalian Bangunan dan Pembinaan Jasa Konstruksi Infrastruktur Berkualitas dengan Sumber Daya Manusia Berkelas	22
Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Perwira Lembah Code	24
Penanganan Air Limbah Domestik Perkotaan Menuju SDG's 2030	28

Bidang Jalan dan Jembatan Jalan Gedongkuning: Proyek Strategis Tingkatkan Kawasan Perdagangan Kota Yogyakarta	32
Jalan Balirejo: Dukung Fasilitas Umum dan Perdagangan Jasa Wilayah	34
Bidang Sumber Daya Air dan Drainase Kolaborasi Pembangunan SAH dan SAL	36
Penataan Bantaran Sungai	38
UPT. Pengelolaan Air Limbah Pengelolaan Limbah untuk Lingkungan Berkelanjutan	40
UPT. Pengelolaan Rusunawa Pengelolaan Rumah Khusus MBR terbaik ke-2 se-Indonesia	42
UPT. Penerangan Jalan Umum Penataan Lampu di Villa Ngestilaras Milik Pemkot Yogyakarta	44

Dinas PUPKP Kota Yogyakarta

Struktur Organisasi	48
Visi Misi Tujuan dan Sasaran Anggaran Pendapatan dan Belanja	50
Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat, Bidang dan UPT Dinas PUPKP	56

01. Sekretariat	56
------------------------	----

02. Bidang Penataan Bangunan	64
-------------------------------------	----

03. Bidang Pengendalian Bangunan dan Pembinaan Jasa Konstruksi	78
---	----

04. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	88
--	----

05. Bidang Jalan dan Jembatan	98
--------------------------------------	----

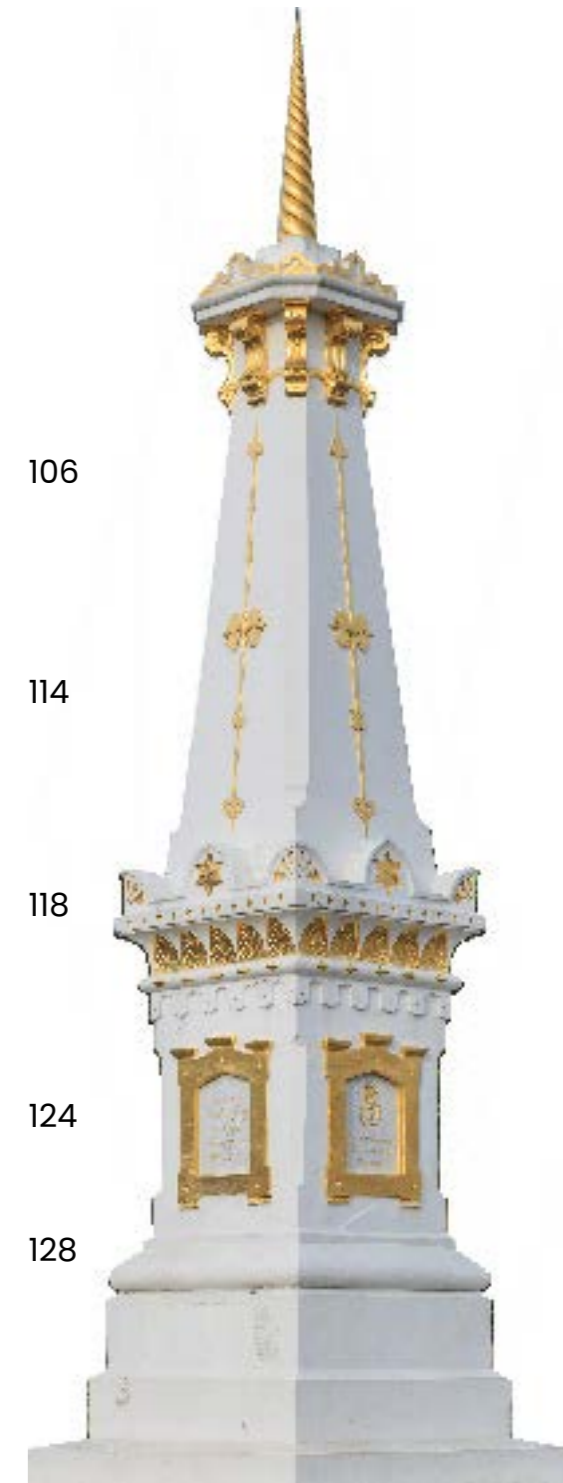
06. Bidang Sumber Daya Air dan Drainase	106
--	-----

07. UPT. Pengelolaan Air Limbah	114
--	-----

08. UPT. Pengelolaan Rusunawa	118
--------------------------------------	-----

09. UPT. Penerangan Jalan Umum	124
---------------------------------------	-----

Penutup	128
----------------	-----



Kata Pengantar

DPUPKP dalam Pembangunan Kota Yogyakarta

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT karena atas segala rahmat dan karunia serta hidayah-Nya, sehingga kami telah berhasil menyusun Buku Profil Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta. Buku ini berisikan hasil pekerjaan yang telah diselesaikan pada tahun 2023 seperti Revitalisasi Pasar Sentul, Pembangunan Panggung Terbuka dan Taman Budaya Embung Giwangan dan proyek strategis lainnya. Selain itu juga disampaikan tugas pokok, fungsi dan anggaran Dinas untuk tahun anggaran 2024.

Kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih atas inisiatif semua pihak yang telah bekerjasama menyumbangkan ide, saran, dan pikiran dalam penyusunan Buku Profil ini. Akhir kata kami ucapkan terima kasih, semoga informasi dalam buku ini bermanfaat bagi kita semua.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yogyakarta, April 2024
Plt. Kepala Dinas PUPKP
Kepala BAPPEDA

Agus Tri Haryono, S.T., M.T.
NIP 197203061996031004



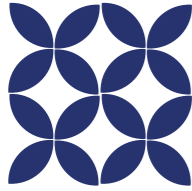
4

► Gedung DPUPKP Kota Yogyakarta

PROFIL DPUPKP KOTA YOGYAKARTA 2024

5





Kota Yogyakarta

Kota Yogyakarta merupakan ibukota Daerah Istimewa Yogyakarta dan menjadi satu-satunya wilayah yang berstatus kota yang dikelilingi empat wilayah lain yang berstatus kabupaten. Kota yang dihuni sekitar 373ribu jiwa ini juga dikenal sebagai Kota Pelajar/ Pendidikan karena banyaknya tempat pendidikan seperti Universitas/Perguruan Tinggi. Selain itu kota ini juga dikenal sebagai kota budaya karena berkaitan erat dengan beragam peninggalan budaya di masa lalu yang hingga kini masih lestari. Banyak bagian dari kota ini dihiasi dengan sentuhan ornamen budaya Jawa seperti lampu hias, bangunan, infrastruktur jalan dan prasarana lain yang membuat kota ini menjadi unik dan cantik.

Yogyakarta memiliki luasan wilayah yang lebih kecil dibandingkan empat kabupaten lain di Daerah Istimewa Yogyakarta. Kota ini memiliki luas sekitar 32,5 km² atau hanya 1,02% dari luas wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Jarak terjauh dari utara ke selatan kurang lebih 7,5 km dan dari barat ke timur kurang lebih 5,6 km. Secara administratif Kota Yogyakarta terdiri dari 14 Kemantren

dan 45 Kelurahan yang berbatasan dengan Kabupaten Sleman di sebelah utara, timur dan barat serta berbatasan dengan Kabupaten Bantul di sebelah timur, selatan dan barat. Kota Yogyakarta terbentang antara 110°24'19"-110°28'53" Bujur Timur dan antara 07°15'24"-07°49'26" Lintang Selatan. Kota Yogyakarta yang terletak di daerah dataran lereng aliran Gunung Merapi memiliki kemiringan lahan yang relatif datar (antara 0-2%) dan berada pada ketinggian rata-rata 114m dari permukaan air laut (dpa). Sebagian wilayah dengan luas 1.657 Ha terletak pada ketinggian kurang dari 100 meter dan sisanya (1.593 Ha) berada pada ketinggian antara 100-199mdpa. Sebagian besar jenis tanahnya adalah regosol. Secara garis besar, kota ini mempunyai tipe tanah regosol atau tanah vulkanis muda. Komposisi penggunaan tanahnya, 74,92% pekarangan, 12,20% sawah, 0,07% tegalan dan 12,81% lain-lain. Wilayah Kota Yogyakarta dilewati oleh tiga sungai besar, yaitu Sungai Gajahwong yang mengalir di bagian timur kota, Sungai Code di bagian tengah, dan Sungai Winongo di bagian barat kota.



► Suasana Tugu Jogja di Malam Hari



Forum OPD untuk Perencanaan 2025

8 **Awal** tahun 2024 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman telah melaksanakan Forum OPD untuk perencanaan tahun 2025. Pada hari Jumat (1/3) Plt. Kepala Dinas PUPKP Bapak Agus Tri Haryono, S.T., M.T. memimpin Forum OPD yang diikuti oleh berbagai OPD lain dalam Pemerintahan Kota Yogyakarta serta instansi terkait seperti DPUPESDM DIY dan Balai Pialam DIY.

Forum tersebut membahas terkait prioritas peningkatan sarana prasarana pendidikan, kualitas infrastruktur pada beberapa kawasan serta mendukung kota Yogyakarta yang aman dan nyaman melalui penataan kawasan kumuh dan pembangunan rumah layak huni. Terdapat 3 sasaran

dalam pembahasan forum tersebut yaitu; Meningkatnya kualitas prasarana umum wilayah; Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman; serta Meningkatnya reformasi birokrasi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman. Rencana kerja tahun 2025 tersebut membutuhkan anggaran Rp269.291.118.205,00 yang terdiri dari 11 Program, 20 Kegiatan, 54 Sub Kegiatan.

Kegiatan Forum OPD pada hari itu berlangsung dengan lancar. Sesi tanya jawab cukup interaktif dengan memunculkan ide dan gagasan untuk tahun selanjutnya. Pada akhir acara dilakukan penandatanganan berita acara sebagai bukti bahwa Forum OPD telah disetujui kedua belah pihak.



“..prioritas peningkatan sarana prasarana pendidikan, kualitas infrastruktur pada beberapa kawasan serta mendukung kota Yogyakarta yang aman dan nyaman melalui penataan kawasan kumuh dan pembangunan rumah layak huni..”

Suasana Forum OPD untuk Perencanaan Tahun 2025 ▲

▼ Tampak Depan Taman Budaya Embung Giwangan



10

Bidang Penataan Bangunan

Taman Edukasi dan Kebudayaan

Dibangun di lahan milik Pemerintah Kota Yogyakarta di Jalan Tegalturi oleh Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak (BBWSO) Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada tahun 2019, Embung Giwangan memiliki volume tampungan sekitar 9.210 meter kubik dan luas genangan sekitar 4,123 meter persegi. Setelah selesai digarap menjadi embung, kemudian dengan kucuran Dana Keistimewaan DIY yang dikelola Dinas PUPKP Kota Yogyakarta tahun 2023 yang bernilai kontrak sekitar Rp 16,8 miliar ini, mampu

menyelesaikan tahap pertama pembangunan Panggung Terbuka Taman Budaya Embung Giwangan yang dimulai pada bulan Juli 2023 dan selesai bulan Desember 2023 yang selanjutnya akan dilanjutkan pembangunan tahap kedua yang akan dilaksanakan pada tahun 2024.

Pembangunan Taman Budaya yang memiliki gaya arsitektur indische dibangun berdasarkan rekomendasi Dewan Pertimbangan dan Pelestarian Wisata Budaya (DP2WB). Pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan pada tahun 2023 yaitu gedung

“..Panggung Terbuka Taman Budaya Embung Giwangan menjadi salah satu destinasi tengah kota Yogyakarta yang cukup unik..”



11

▲ Panggung Terbuka Embung Giwangan



(1) View Embung Giwangan dari lantai 2; (2) Tampak Depan Taman Budaya; (3) Koridor lantai 2; (4) Tampak Taman Budaya dari sisi dalam.

perkantoran yang berfungsi untuk penjualan tiket, kantor manajemen dan fungsi administratif lainnya. Selanjutnya adalah Panggung terbuka untuk memfasilitasi kegiatan pertunjukan dengan nuansa embung dan latar belakang gedung Taman Budaya. Selain itu juga telah dibangun area parkir kendaraan yang dapat menampung 20 mobil dan 3.000 motor. Pada Tahun 2024 ini akan dilakukan pekerjaan Gedung Graha Budaya untuk kegiatan indoor sebagai aspirasi Dinas Kebudayaan yang menjadi penanggung jawab utama Embung Giwangan.

Panggung Terbuka Taman Budaya Embung Giwangan menjadi salah satu destinasi tengah kota Yogyakarta yang cukup unik. Selain sebagai embung, juga dikembangkan sebagai ruang apresiasi seni dan budaya yang dapat menarik minat masyarakat dan wisatawan untuk berkunjung. Konsep pembangunan yang awalnya akan diterapkan di Taman Pintar ini memiliki banyak fungsi yaitu selain sebagai pusat kebudayaan juga dapat dimanfaatkan untuk kegiatan keseniang, olahraga dan yang lainnya. Sehingga nantinya Taman Budaya Embung Giwangan ini dapat menjadi salah satu pusat kegiatan di Kota Yogyakarta.





14

15

(1) Suasana tribun penonton; (2) View pentas di Panggung Terbuka; (3) Signage Taman Budaya pada malam hari; (4) Orkestra pengiring pentas.

Pasar Tradisional Masa Kini

Sepanjang tahun 2023 telah dilaksanakan pekerjaan revitalisasi Pasar Sentul yang berlokasi di Jl. Sultan Agung No.52 Yogyakarta. Sebelum dilakukan revitalisasi, seluruh pedagang direlokasi terlebih dahulu di shelter sementara yang terletak di Jl. Pandeyan Yogyakarta hingga pekerjaan revitalisasi selesai dilaksanakan. Walaupun direlokasi, kegiatan perekonomian pasar tetap berjalan secara normal.

Setelah menunggu beberapa bulan pengerjaan revitalisasi selesai, peresmian Pasar Sentul disambut dengan gembira oleh ratusan pedagang di yang akan mengisi los dan kios dalam pasar. Revitalisasi pasar yang didanai oleh Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta senilai Rp 23 Miliar ini dibangun sejak bulan Mei 2023 hingga Desember tahun 2023 dan resmi dibuka pada Selasa (27/02) oleh Wakil Gubernur DIY KGPAA Paku Alam X.

Selain mengembangkan perekonomian warga kota Yogyakarta, pasar yang terdiri dari tiga lantai ini menjadi prasarana untuk masyarakat sebagai pusat peradaban dan interaksi sosial serta integritas pasar kuliner. Hadirnya Pasar Sentul dengan berbagai perubahan baiknya, diharapkan dapat mendukung kawasan Pakualaman sebagai destinasi wisata budaya.

Sebagai salah satu pusat prasarana kegiatan perekonomian di kawasan Pakualaman, pasar yang diusung dengan konsep modern dan memiliki fasad arsitektur Indische ini mampu menampung 695 pedagang yang terdiri dari 529 pedagang dari Pasar Sentul, Alun-Alun Sewandanan dan kios biru Bintaran (PKL). Para pedagang akan mendapatkan fasilitas kios berukuran 3x3 dan 2x3, los berukuran 1x2 dengan pembagian zona kering di lantai satu dan zona basah

Peresmian Pasar Sentul oleh Wakil Gubernur DIY KGPAA Pakualam X dan Pj. Walikota Yogyakarta Singgih Raharjo S.H., M.Ed.



“..modern, bersih, sehat dan nyaman menjadi prioritas revitalisasi pasar ini.”

PASAR SENTUL

DIY

DANA KEISTIMEWAAN



(1) Suasana jual-beli di dalam pasar; (2) Plaza foodcourt di lantai 3; (3) Fasilitas eskalator; (4) Ramp sebagai fasilitas pendukung disabilitas.

seperti daging di lantai dua. Sedangkan di area rooftop dilengkapi plaza yang akan ditempati oleh pedagang luberan, dan ketika malam hari akan digunakan untuk kegiatan kuliner.

Modern, bersih, sehat dan nyaman menjadi prioritas revitalisasi pasar ini. Termasuk kelengkapan fasilitas seperti eskalator yang mempermudah mobilisasi pedagang dan pembeli, toilet yang bersih, mushola yang nyaman, parkir motor dan mobil, area bongkar muat, pos jaga hingga ketersediaan listrik dan air dan tidak ketinggalan juga yaitu fasilitas

bagi penyandang disabilitas.

Meskipun pengerjaan revitalisasi pasar telah selesai 100% pada awal tahun 2024 masih dilakukan pemeliharaan yaitu menata dan menandai zonasi pedagang. Setelah masa pemeliharaan selesai, pasar dapat beroperasi secara optimal. Setelah dapat beroperasi secara optimal harapannya revitalisasi Pasar Sentul ini juga dapat menjawab tantangan dan bertahan di era perkembangan zaman digital dan gempuran e-commerce.



Fasilitas eskalator guna menunjang kegiatan di Pasar Sentul

► Foto Udara Pasar Sentul setelah direvitalisasi



20



(1) Fasad pasar dari sisi timur; (2) Pintu masuk pada suasana malam; (3) Penampilan pasar dari seberang jalan Sultan Agung; (4) Area parkir, ramp dan pertokoan di area depan.

21

Infrastruktur Berkualitas dengan Sumber Daya Manusia Berkelas

Sektor konstruksi masih menjadi salah satu sektor yang berkembang di Kota Yogyakarta. Perlu diingat, tanggung jawab pembinaan jasa konstruksi bukan hanya merupakan tanggung jawab pemerintah saja namun sejatinya seluruh masyarakat jasa konstruksi yang diharapkan dapat bersinergi bersama pemerintah dalam mewujudkan penyelenggaraan jasa konstruksi yang komprehensif dan adaptif terhadap perubahan dan perkembangan zaman.

Ketua Tim Kerja Pembinaan Jasa Konstruksi, Artanti Setyaningsih menyebutkan dalam pelaksanaan pembinaan jasa konstruksi, PJK berperan penting untuk meningkatkan kualitas SDM konstruksi. Dinas PUPKP Kota

Yogyakarta melalui Tim Kerja Pembinaan Jasa Konstruksi secara rutin melaksanakan kegiatan Pelatihan dan Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi untuk meningkatkan kualitas SDM Konstruksi. Tercatat pada tahun 2023 telah diselenggarakan 6 kali Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi dan 4 kali Uji Sertifikasi dimana 114 Tenaga Kerja Konstruksi Terampil dinyatakan Kompeten di masing-masing bidang.

Selain meningkatkan kualitas Tenaga Kerja Konstruksi, PJK juga melaksanakan program peningkatan kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi melalui kegiatan Forum Komunikasi Jasa Konstruksi dan Sosialisasi terkait Peraturan-Peraturan dan Perkembangan seputar dunia Jasa



Uji Kompetensi



Kegiatan Sosialisasi



Forum Komunikasi



Kegiatan Pelatihan

22

23

“..harapannya dapat mendampingi badan usaha jasa konstruksi daerah untuk cepat beradaptasi dengan berbagai peraturan, metode, maupun teknologi terkini..”

Konstruksi. Artanti berharap PJK dapat mendampingi badan usaha jasa konstruksi daerah untuk cepat beradaptasi dengan berbagai peraturan, metode, maupun teknologi terkini sehingga dapat berkembang serta kompetitif.

Peran PJK lainnya adalah memastikan produk jasa konstruksi yang dibangun memenuhi standar keselamatan, kualitas, dan keberlanjutan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Hal itu diwujudkan dengan pelaksanaan kegiatan pengawasan

penyelenggaraan jasa konstruksi. Menurut Artanti, keberlanjutan sektor jasa konstruksi juga dapat diraih melalui dukungan menerus pada pengembangan teknologi dan inovasi konstruksi. Teknologi informasi yang melaju pesat turut memicu percepatan digitalisasi jasa konstruksi namun kemajuan zaman juga membuat tantangan dan masalah yang dihadapi semakin beragam. Akan tetapi PJK memandang tantangan tersebut sebagai langkah yang harus diambil untuk mewujudkan penyelenggaraan jasa konstruksi yang handal.

Perwira Lembah Code

Taman Perwira Lembah Code di Kelurahan Prawirodirjan merupakan salah satu wujud dari penataan kawasan kumuh di bantaran Sungai Code Kota Yogyakarta. Penataan yang dilakukan pada tahun 2023 ini merupakan bentuk komitmen APBD dalam mengentaskan Kawasan Kumuh di Kota Yogyakarta pasca selesainya Program National Slum Upgrading Project (NSUP) dan Kota Tanpa Kumuh (Kotaku).

Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman bekerjasama dengan Kelurahan Prawirodirjan melaksanakan penataan kawasan kumuh di Bantaran Sungai Code, tepatnya di RW 18 Prawirodirjan. Sesuai dengan masterplan yang dimiliki Kelurahan Prawirodirjan, penataan kawasan ini bertujuan untuk mengembalikan fungsi lahan Sultan Ground di Bantaran Sungai Code yang dulunya dihuni warga menjadi ruang terbuka hijau publik (RTHP) yang keberadaannya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Selain itu, tujuan dari penataan kawasan di bantaran sungai Code ini adalah untuk mengurangi kawasan kumuh serta mengentaskan indikator kumuh yang dominan dan belum tertangani di wilayah tersebut.

Berada di bantaran Sungai Code tepatnya di selatan bendung Mergangsan, lokasi pembangunan Taman Perwira Lembah Code, sebelumnya ditempati oleh warga yang tidak mempunyai bukti alas hak di atas tanah Sultan Ground. Dari jembatan bendung mergangsan, terlihat badan sungai di wilayah ini menjadi titik akumulasi sampah paling kritis di aliran sungai Code. Citra lingkungan bantaran yang kotor, kumuh dan tidak teratur mendorong pemerintah wilayah menyusun rencana induk penataan untuk mentransformasi kawasan tersebut.

Di tahun 2021, penataan Lembah Code Kelurahan Prawirodirjan dimulai dengan *Land Clearing* - membebaskan lahan Sultan Ground seluas 1.500 meter persegi dari fungsi yang tidak seharusnya serta dari penggunaan warga yang tidak memiliki alas hak untuk memberikan ruang bagi fasilitas publik. Penataan dilanjutkan pada tahun 2023 dengan pembangunan ruang terbuka hijau publik (RTHP) di bantaran sungai yang meliputi pembangunan pendopo, amphitheater, toilet dan taman yang dilengkapi tempat bermain anak.



Taman Perwira menjadi pusat kegiatan masyarakat ▲

Mengembalikan fungsi tanah **Sultan Ground** sebagai ruang bagi **fasilitas publik** sekaligus untuk mengentaskan kawasan kumuh



(1) Masyarakat menikmati suasana pinggir sungai Code; (2) Pintu masuk menuju Taman Perwira; (3-4) Suasana Kampung Ramadhan di Taman Perwira

Gagasan utamanya adalah untuk mendekatkan sungai sebagai area yang bisa dimanfaatkan oleh siapa saja. Karena selama ini talud seolah memisahkan antara sungai dengan area permukiman, sehingga seringkali sungai menjadi “area belakang” yang kotor dan tidak terawat. Diharapkan dengan adanya RTHP ini dapat menjadikan sungai sebagai wahana bersama, sehingga dapat dijaga dan dirawat bersama.

Pada Sabtu (16/3/2024), Taman Perwira Lembah Code ini secara langsung telah diresmikan oleh Penjabat Walikota Jogja Singgih Raharjo, sekaligus membuka kegiatan Pasar Sore Ramadhan. Hadirnya UMKM kuliner sekitar menjadi daya tarik tersendiri

bagi acara tersebut.

Harapannya, Taman Perwira Lembah Code ini dapat dimanfaatkan masyarakat untuk berbagai aktivitas. Adanya pendopo dan amphiteater dapat dimanfaatkan untuk kegiatan sosial dan budaya. Hadirnya ruang terbuka hijau publik (RTHP) berupa taman dapat dimanfaatkan sebagai tempat rekreasi, bermain, maupun olahraga seperti jogging dan bersepeda. Terlebih, melalui dukungan infrastruktur yang ada diharapkan dapat meningkatkan perekonomian warga, serta menjadi pengungkit kesejahteraan di wilayah. Bahkan bisa menjadi alternatif wisata di Kota Jogja.



Taman Perwira menjadi pusat kegiatan masyarakat ▲

Penanganan Air Limbah Domestik Perkotaan Menuju SDG's 2030

Sanitasi layak merupakan salah satu tujuan SDGs (Sustainable Development Goals) 2030 untuk mencapai kehidupan yang lebih baik di masa mendatang. Untuk mendukung hal tersebut, Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman di tahun anggaran 2023 ini telah melakukan penanganan air limbah domestik dengan melaksanakan sub kegiatan Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota, Pembangunan/ Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota, dan Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karaton.

Secara umum ketiga sub kegiatan tersebut bertujuan membantu warga untuk mengatasi permasalahan sanitasi dengan menyambungkan saluran limbah domestik dari masing-masing rumah ke jaringan air limbah terpusat. Limbah yang sudah masuk dalam jaringan air limbah terpusat akan diolah di

IPAL Sewon. Sedangkan untuk daerah-daerah yang tidak bisa dijangkau dengan jaringan air limbah terpusat dikarenakan elevasi, Pemerintah Kota Yogyakarta membangun IPAL komunal untuk mengolah buangan air limbah domestik tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi pencemaran air tanah oleh bakteri e-Coli.

Pada tahun 2023 ini, Pemerintah Kota Yogyakarta berhasil melakukan kegiatan penanganan air limbah domestik di 13 Kemantren (Danurejan, Mantrijeron, Klitren, Danurejan, Gondokusuman, Klitren, Mantrijeron, Mergangsan, Kadipaten, Patehan, Patangpuluhan, Pandeyan, dan Warungboto) dengan total 681 sambungan rumah yang tersambung dan 9 IPAL komunal yang terbangun.

Tentunya dalam pelaksanaan kegiatan ini terdapat beberapa tantangan dalam proses pelaksanaannya. Seperti warga yang menolak rumahnya disambungkan karena tidak mau



“..sanitasi layak merupakan salah satu tujuan SDGs (Sustainable Development Goals) 2030 untuk mencapai kehidupan yang lebih baik di masa mendatang.”

keramik rumahnya dibongkar, bangunan yang merupakan cagar budaya yang tidak boleh dirubah, lokasi pekerjaan yang berada di jalan utama, dan lain sebagainya. Namun tantangan tersebut sudah menjadi bahan diskusi dan sudah terselesaikan dengan baik

sehingga kegiatan penanganan air limbah domestik di tahun anggaran 2023 dapat terselesaikan. Sampai saat ini jumlah SR di Kota Yogyakarta yang telah tersambung ke IPAL Sewon sejumlah 19.831 unit.



(1) Proses pembongkaran awal; (2) Kegiatan survei lokasi kegiatan; (3) Pemasangan pipa sambungan; (4) Proses finishing pekerjaan.



Proses penyambungan sanitasi sambungan rumah ▲

Pemeliharaan Jalan Gedongkuning Proyek Strategis Tingkatkan Kawasan Perdagangan Kota Yogyakarta

Sebagai salah satu faktor penting dalam meningkatkan ekonomikawasan, pemeliharaan jalan menjadi bagian vital dalam menyediakan sarana dan prasarana publik yang aman dan nyaman bagi masyarakat. Jalan Gedongkuning yang terletak di perbatasan Kota Yogyakarta dengan Kabupaten Bantul merupakan salah satu akses penghubung strategis menuju Satuan Ruang Strategis Kotagede dan Kebun Raya Kebun Binatang Gembira Loka. Jalan Gedongkuning juga berperan penting dalam pengembangan UMKM sebab area tersebut merupakan kawasan perdagangan yang didominasi oleh pelaku usaha lokal.

Dengan banyaknya potensi yang dimiliki Jalan Gedongkuning, pada Tahun Anggaran 2023 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta

menyelenggarakan kegiatan pemeliharaan berkala jalan dengan tujuan memperpanjang usia layanan jalan, serta meningkatkan keamanan dan kenyamanan bagi pengguna jalan dalam beraktivitas. Lokus kegiatan dimulai dari Simpang Gedongkuning di sisi utara sampai dengan Simpang Rejowinangun di sisi selatan sepanjang 950 meter.

Pekerjaan utama dalam Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan Gedongkuning

adalah perbaikan struktur jalan, penghamparan lapis tambah aspal (overlay), perbaikan saluran drainase dengan periode pelaksanaan pekerjaan selama 150 hari kalender. Peran serta masyarakat dan koordinasi dengan instansi terkait dilaksanakan bersinergi dengan perencanaan dan pelaksanaan pekerjaan fisik. Sebagai salah satu dari 10 Program Strategis Pemerintah Kota Yogyakarta, pekerjaan dengan pagu anggaran sebesar 5.920.860.000 Rupiah mendapatkan pendampingan dari Kejaksaan Negeri Yogyakarta dan dapat diselesaikan dengan baik sesuai tata kala yang direncanakan.



Proses Pemeliharaan Rutin Jalan Gedongkuning



Kondisi Jalan Gedongkuning setelah dilakukan Pemeliharaan Rutin Jalan



Bidang Jalan dan Jembatan

Pemeliharaan Jalan Balirejo Dukung Fasilitas Umum Dan Perdagangan Jasa Wilayah

34 **Jalan** Balirejo sebagai salah satu ruas jalan kota yang terletak di Kemantren Umbulharjo, jalan ini merupakan akses penting untuk melayani mobilitas masyarakat di sekitar Komplek Balaikota Yogyakarta. Jalan tersebut membentang sepanjang 822,4 meter dan berbatasan dengan Kabupaten Bantul di sisi timur. Sebagai salah satu dari 10 Program Strategis Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2023, Pemeliharaan Berkala Jalan Balirejo bertujuan untuk meningkatkan perekonomian wilayah khususnya dalam mendukung kawasan perdagangan dan jasa, kawasan pendidikan dan kantor pelayanan publik milik Pemerintah Kota Yogyakarta dan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, serta mobilitas permukiman warga.

Pekerjaan dengan pagu anggaran sebesar 1.606.783.200 Rupiah ini dilaksanakan selama 150 hari kalender, dimulai pada Bulan Juli 2023. Pekerjaan utama berupa perbaikan saluran drainase dan penghamparan lapis tambah aspal (overlay). Sebelum dimulainya pekerjaan tersebut dilakukan komunikasi

dengan warga, penyedia fasilitas pendidikan dan perkantoran, serta pedagang kaki lima di sekitar untuk meminimalkan dampak yang terjadi selama masa pekerjaan.

Dengan adanya kegiatan pemeliharaan Jalan Balirejo tersebut diharapkan dapat membantu meningkatkan ekonomi warga sekitar dengan memberikan layanan infrastruktur jalan dan pelengkap jalan yang aman dan nyaman.



Proses Pemeliharaan Rutin Jalan Balirejo

Kondisi Jalan Balirejo setelah dilakukan Pemeliharaan Rutin Jalan



Kolaborasi Pembangunan SAH dan SAL

Kota Yogyakarta memiliki luas 32,5 km² atau 1,02% dari luas wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta juga menjadi kota terpadat dibandingkan dengan kabupaten lain yang ada di DIY. Pasokan air bersih dan pembuangan air kotor adalah hal yang sering menjadi permasalahan dialami oleh penduduk yang tinggal di area yang padat. Bidang Sumber Daya Air dan Drainase Dinas PUPKP Kota Yogyakarta telah membuat terobosan terkait permasalahan yang ada di masyarakat, yaitu pembangunan Sistem Pemanfaatan Air Hujan (SPAH) dan kolaborasi pembangunan saluran air hujan yang terintegrasi dengan pembangunan saluran air limbah.

Pembangunan SPAH di Yogyakarta dilakukan dengan inovasi pembangunan dalam Saluran Air Hujan atau Saluran Drainase. Pembangunan SPAH yang ada di dalam saluran memiliki beberapa manfaat yaitu : Mengurangi volume limpasan, menampung air hujan yang dapat terserap ke dalam tanah dan memudahkan dalam melakukan pemeliharaan saluran. Konstruksi SPAH dengan buis beton diameter 80 cm dengan kedalaman ± 2,5 - 3,5

m, dibangun dalam saluran air hujan berjarak 10 m antar SPAH. Pemeliharaan Saluran air hujan dapat dilakukan pada titik SPAH yang ada dengan pengambilan sedimentasi. SPAH harapannya juga dapat membantu menaikkan muka air tanah untuk mengatasi krisis air pada musim kemarau.

Kolaborasi pembangunan Saluran Air Hujan dengan Saluran Air Limbah sangat bermanfaat di kota yang memiliki permukiman yang padat. Saluran air hujan dapat mengatasi limpasan air hujan sehingga tidak menggenangi jalan yang akan menghambat mobilisasi masyarakat, dan pembangunan Saluran Air Limbah dilakukan untuk mengakomodir pembuangan air kotor rumah tangga yang dapat mencemari lingkungan sehingga harus dibuat saluran khusus untuk menyalurkan ke tampungan terpadu pada setiap titik yang ada di suatu wilayah. Pembangunan SAH kolaborasi dengan pembangunan SAL bertujuan untuk mengatasi pencemaran lingkungan terutama kualitas air yang nantinya akan diresapkan pada titik SPAH yang ada.



“...kolaborasi Pembangunan SAH dan SAL untuk menjaga kualitas air yang akan diresapkan

Penataan Bantaran Sungai

Sungai di Kota Yogyakarta secara umum sudah bertanggung, namun banyak tanggul yang memiliki konstruksi sederhana berupa pasangan batu kali atau bronjong yang bersifat sementara. Konstruksi yang sederhana bahkan bersifat sementara ini tentu tidak berisiko apabila tidak ada permukiman di sekitar bantaran sungai. Namun karena di Kota Yogyakarta, hampir sepanjang sungai yang ada terdapat permukiman di sisi nya. Untuk itu diperlukan perkuatan tebing sungai dengan struktur yang lebih baik dan kuat. Upaya perkuatan ini harus sinergis dengan upaya penataan permukiman di bantaran sungai karena permukiman yang tidak tertata akan menyulitkan proses pembangunan dan juga pemeliharaan tanggul sungai

Penataan kawasan permukiman di bantaran sungai yang ada di kota Yogyakarta memerlukan pendekatan kolaboratif dan komprehensif. Selain pendekatan teknis, diperlukan pendekatan sosial dan hukum. Untuk penyelesaian permasalahan teknis, upaya yang dilakukan haruslah kolaboratif melibatkan bidang-bidang di DPUPKP yakni

bidang Perkim dan bidang SDA. Pembagian perannya adalah Bidang SDA melakukan pembangunan talud sungai sedangkan bidang perkim melaksanakan penataan permukiman dan utilitas lain di atasnya.

Kerja sama ini dapat dilaksanakan secara bersamaan dalam tahun anggaran yang sama atau bisa dilakukan pembangunan talud sungai terlebih dahulu di tahun anggaran sebelumnya. Hal yang harus jelas di awal untuk pembangunan talud ini adalah permasalahan sosial dan hukum di lokasi tersebut. Kepastian kepemilikan tanah akan mempengaruhi kepastian kepemilikan aset talud. Sedangkan permasalahan sosial juga harus dipastikan terkelola dengan baik untuk menciptakan suasana kondusif dan mendukung pembangunan talud sungai. Untuk masalah teknis pembangunan talud, meskipun sering terkendala kondisi lapangan, relatif lebih mudah penyelesaiannya. Misalnya perlu perubahan desain pondasi tebing, atau perubahan metode pelaksanaan, masih jauh lebih mudah dipecahkan daripada permasalahan sosial atau hukum.



“...Penataan kawasan permukiman di bantaran sungai yang ada di kota Yogyakarta memerlukan pendekatan kolaboratif dan komprehensif...”

Pengelolaan Limbah untuk Lingkungan Berkelanjutan

Dalam kehidupan sehari-hari, sesungguhnya kita menghasilkan limbah yang disebut limbah domestik. Limbah domestik ini terdiri dari limbah cair domestik dan limbah padat domestik. Limbah cair domestik sendiri dikategorikan menjadi Grey Water dan Black Water.

Grey water yaitu limbah non kakus yang berasal dari aktivitas rumah tangga seperti memasak dan mencuci, sedangkan Black water merupakan limbah kakus yang terdiri dari kotoran manusia dan hewan.

Namun sudahkah kita mengetahui bahwa air limbah sisa aktivitas kita sehari-hari tidak dapat langsung dilepaskan begitu saja di lingkungan? Sederhananya, beberapa jenis limbah dapat memberikan efek buruk bagi kesehatan jika tidak diolah dengan benar. Pengelolaan air limbah domestik yang terintegrasi merupakan salah satu indikator penting dalam mewujudkan sanitasi aman. Pengelolaan air limbah domestik merupakan pekerjaan panjang dari hulu hingga hilir.



Mobil Toilet milik Pemerintah Kota Yogyakarta



Pengecekan rutin bak kontrol

“...pelayanan pengelolaan air limbah, pengoperasionalan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah, dan melakukan pemungutan retribusi air limbah..”

Dari hulu yang berarti dimulai dari dalam rumah, hingga hilir yang menjadi akhir dari pengolahan limbah domestik.

Pengolahan air limbah domestik di Yogyakarta dimulai pada tahun 1925 sampai dengan 1938, Bangunan tersebut merupakan IPAL Kraton Yang merupakan bangunan peninggalan Belanda yang digunakan untuk mengelola limbah meliputi wilayah Kota Yogyakarta. Instalasi Pengelolaan Air Limbah tersebut berlokasi di Ngasem. Namun saat ini IPAL Kraton sudah tidak lagi difungsikan.

Pada tahun 2016 pemerintah kota Yogyakarta melalui Perwal No. 98 tahun 2016 membentuk Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Air Limbah Yang berada dibawah naungan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman. Adapun terdapat 3 tugas pokok UPT PAL antara lain pelayanan pengelolaan air limbah, pengoperasionalan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah, dan melakukan pemungutan retribusi air limbah. Layanan lainnya antara lain layanan sedot lumpur tinja

tidak terjadwal dan layanan sewa toilet mobil baik VIP maupun biasa

Saat ini pengolahan air limbah dilakukan menggunakan IPAL Sewon yang dikelola oleh Balai Pialam (Pengelolaan Infrastruktur Air Limbah dan Air Minum Perkotaan). Balai Pialam Merupakan unit pelaksana teknis Dinas PUP-ESDM Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta. IPAL Sewon merupakan instalasi pengolah air limbah terpusat berskala regional yang terletak Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul. Terdapat 3 wilayah yang memanfaatkan keberadaan IPAL Sewon yaitu kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Bantul dengan pengelolaan Bersama melalui Sekber Kartamantul. Adapun ketugasan pemeliharaan saluran di wilayah kota Yogyakarta menjadi kewenangan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui UPT Pengelolaan Air Limbah.



Pengelolaan Rumah Khusus MBR Terbaik ke-2 se-Indonesia

Agustus 2023 menjadi salah satu bulan yang istimewa bagi UPT Rusunawa DPUPKP Kota Yogyakarta. Kamis (31/8/2023) Pemerintah Kota Yogyakarta melalui UPT Rusunawa DPUPKP mendapatkan penghargaan sebagai Pengelola Rumah Khusus MBR terbaik ke-2 se-Indonesia pada acara Hari Perumahan Nasional 2023 yang diselenggarakan oleh Kementerian PUPR dan bertempat di Auditorium Kementerian PUPR Jakarta. Penghargaan tersebut didapatkan dari hasil kerja keras pengelolaan rusunawa Bener Tower 1 dan Tower 2. Berikut ini adalah sekilas informasi terkait Rusunawa Bener.

Rusunawa MBR Bener yang terletak di Jl. Sidomulyo No. 356, Bener, Tegalrejo, Kota Yogyakarta terdiri dari 2 gedung, yaitu Tower 1 dan Tower 2. Tower 1 dengan luas tanah 2.712 m2 dan luas bangunan 875 m2 dibangun pada tahun 2018 dan selesai tahun 2020. Namun dikarenakan Covid-19 melanda Indonesia, maka pada tahun 2020 – Februari 2023, Tower 1 ini dialihkan sebagai shelter Covid-19 dan mulai aktif beroperasi sebagai hunian sejak bulan Maret 2023. Untuk Tower 2, dengan luas tanah 2.986 m2 dan luas bangunan 930 m2, dibangun pada tahun 2020, dan mulai aktif digunakan sebagai hunian sejak bulan September 2022.

Tower 1 dan Tower 2 memiliki 3 lantai yang masing-masing memiliki 44 unit, dengan rincian Tower 1 memiliki 38 unit hunian, 4

unit hunian difabel dan 2 unit ruang usaha. Sedangkan Tower 2 memiliki 42 unit hunian dan 2 unit hunian difabel. Hunian dengan luas 36 m2 ini memiliki fasilitas lengkap, diantaranya 2 kamar tidur dengan lemari pakaian di masing-masing kamar, ruang tamu dengan 1 set meja dan kursi, ruang makan dengan 1 set meja dan kursi, dapur, area cuci dan jemur, kamar mandi dengan wastafel, shower dan toilet duduk. Setiap hunian disediakan alat token listrik sendiri serta meteran air. Untuk pengelolaan air bersih, di Rusunawa MBR Bener menggunakan sumur bor dan bukan PDAM dan kami kelola sendiri.

Setiap tower juga menyediakan fasilitas umum, yang terdiri dari ruang serbaguna yang dilengkapi meja, kursi serta AC. Lalu ada mushola, toilet umum untuk pria dan wanita masing-masing 2 bilik, halaman yang luas disertai dengan taman dan juga disediakan tempat parkir untuk penghuni. Dikarenakan ada unit yang disediakan khusus untuk difabel, Rusunawa Bener juga menyediakan jalur khusus difabel.



UPT Rusunawa selalu mengedepankan kebersihan lingkungan. Terdapat 2 orang Cleaning Service yang setiap hari membersihkan luar dan dalam gedung. Untuk pengelolaan sampah hunian dikelola secara mandiri dimana akan dilakukan pemisahan terhadap sampah organik, sampah anorganik dan sampah residu. Terdapat berbagai macam sayuran, mulai dari tanaman cabai, pepaya dan sebagainya di area terbuka rusunawa, dimana setiap penghuni bebas untuk memetikinya.

Untuk menjaga keamanan dan kenyamanan setiap penghuni, Rusunawa Bener menyediakan 3 petugas security yang berjaga bergantian selama 24 jam. CCTV di tempat strategis juga disediakan sebagai penunjang keamanan. Selain keamanan dan kenyamanan, untuk mengatasi kerusakan ringan hingga



sedang secara berkala, ada 2 orang tenaga teknis yang selalu siap setiap saat.

Ketika rusun mulai aktif dihuni, pihak pengelola melakukan pembentukan paguyuban, dimana pengelolaan diatur oleh penghuni sendiri tanpa campur tangan dari pengelola. Pembentukan paguyuban ini dimaksudkan untuk meningkatkan rasa kebersamaan antar sesama penghuni. Adapun kegiatan yang dilakukan paguyuban diantaranya ronda malam, posyandu, serta mengadakan TPA dan sholat tarawih bersama saat bulan Ramadhan serta sholat Idul Fitri atau kegiatan lainnya untuk memperingati hari besar. Dari pihak pengelola, kami selalu menerapkan kepada penghuni untuk selalu menjaga ramah tamah dan toleransi antar umat beragama.





UPT Penerangan Jalan Umum

Penataan Lampu di Villa Ngestilaras Milik Pemkot Yogyakarta

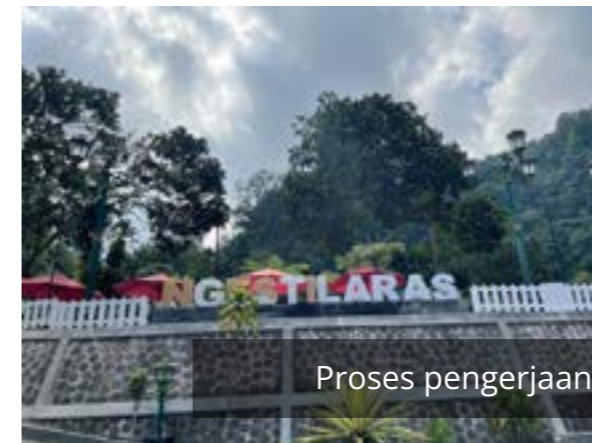
44

Pemerintah Kota Yogyakarta dengan bangga mengumumkan langkah terbaru dalam pengembangan sektor pariwisata daerah, melalui pengembangan villa yang bernama “Ngestilaras” di Kawasan Wisata Kaliurang pada tahun 2023. Kaliurang dikenal sebagai daerah yang dikelilingi oleh keindahan alam pegunungan dan udara yang sejuk, menjadikannya pilihan ideal bagi para wisatawan yang ingin menikmati ketenangan serta keindahan alam yang memukau.

UPT Penerangan Jalan Umum Dinas PUPKP Kota Yogyakarta selaku pengampu pekerjaan Penataan Lampu Ngestilaras tersebut menyebutkan bahwa waktu pelaksanaan pekerjaan tersebut selama 60 hari kalender. Penerangan di villa Ngestilaras dirancang untuk mempercantik keindahan malam di sekitarnya. Pencahayaan eksterior yang dipilih dengan bijak mampu menyorot

keindahan arsitektur villa serta lansekap sekitarnya.

Dengan perhatian khusus terhadap sistem pencahayaan yang mencerminkan keindahan alam sekitarnya, penataan villa Ngestilaras di Kaliurang merupakan bukti nyata komitmen pemerintah dalam mengembangkan sektor pariwisata yang berkelanjutan dan menyajikan pengalaman tak terlupakan bagi para pengunjung. Diharapkan, kehadiran villa ini tidak hanya menjadi destinasi wisata yang populer tetapi juga memberikan dampak positif bagi ekonomi lokal dan pelestarian lingkungan. Dinas PUPKP turut menjaga keindahan alam dan mendukung pengembangan pariwisata. Selamat menikmati keindahan alam dan pengalaman tak terlupakan di Villa Ngestilaras.



Proses pengerjaan



Proses pengerjaan



Suasana Villa Ngestilaras pada malam hari

45





PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
**DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN**
Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta Kode Pos : 55165 Telp. (0274) 515867, 586795, 515865, 562682
Fax (0274) 586795
EMAIL : puperkim@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 08122780001 HOTLINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

DPUPKP

1.

Struktur Organisasi

2.

Visi Misi Tujuan dan Sasaran Anggaran Pendapatan dan Belanja

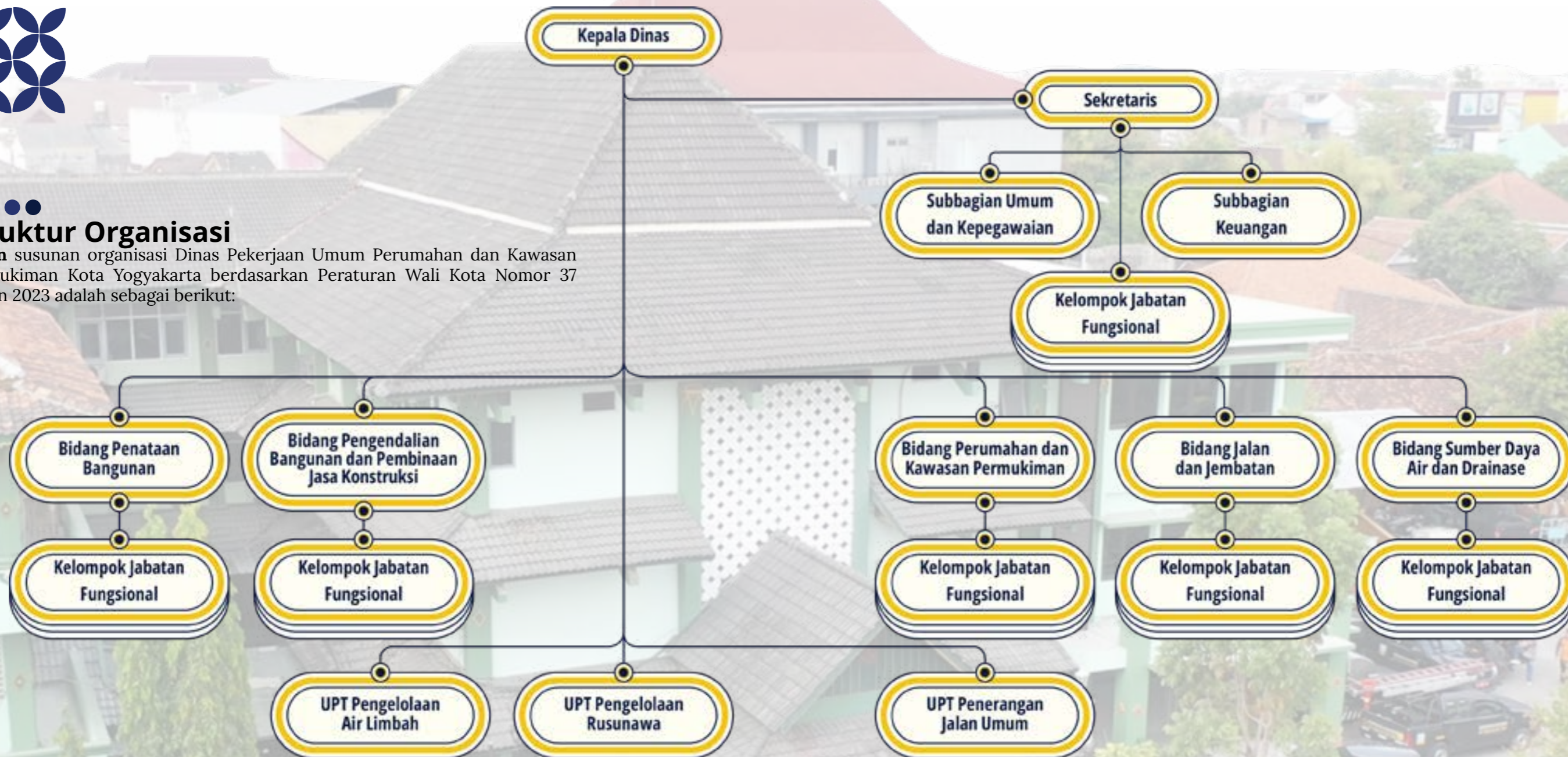
3.

Tugas Pokok dan Fungsi Bidang dan UPT Dinas PUPKP



Struktur Organisasi

Bagan susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 37 Tahun 2023 adalah sebagai berikut:





Visi Misi Tujuan dan Sasaran Anggaran Pendapatan dan Belanja

Visi

Selaras dengan visi Kota Yogyakarta maka visi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta adalah; **“Kota Yogyakarta Sebagai Kota Pendidikan Berkualitas, Pariwisata Berbasis Budaya dan Pusat Pelayanan Jasa yang Berwawasan Lingkungan”**.

Tema Pembangunan

Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan perumahan memiliki kewajiban untuk mewujudkan pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas dengan memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.

50

Misi

Dari visi tersebut , Misi yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- Mewujudkan pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas

Tujuan dan Sasaran Strategis

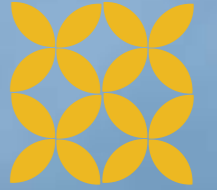
- Meningkatkan kualitas prasarana umum wilayah
- Meningkatkan Kualitas Perumahan dan Permukiman
- Meningkatkan reformasi birokrasi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman

Maklumat Pelayanan Publik

“Dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila tidak menepati janji ini kami bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku”

Motto

Melayani kerusakan 2x24 jam dengan semboyan **“Bekerja Keras, Bergerak Cepat dan Bertindak Tepat”**



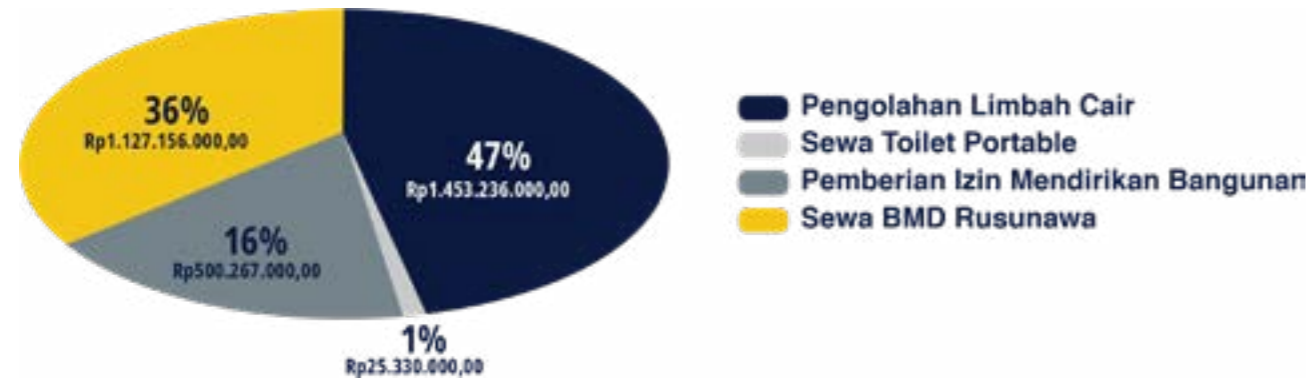
51

▶ Suasana Tugu Jogja di Malam Hari

Pendapatan 2023

Anggaran pendapatan mengelola pendapatan asli daerah yang berasal dari retribusi daerah:

- a. Pengolahan limbah cair **Rp1.453.236.000,00**
- b. Sewa toilet portable **Rp25.330.000,00**
- c. Pemberian izin mendirikan bangunan **Rp500.267.000,00**
- d. Sewa BMD Rusunawa **Rp1.127.156.000,00**



52

Anggaran Belanja 2024

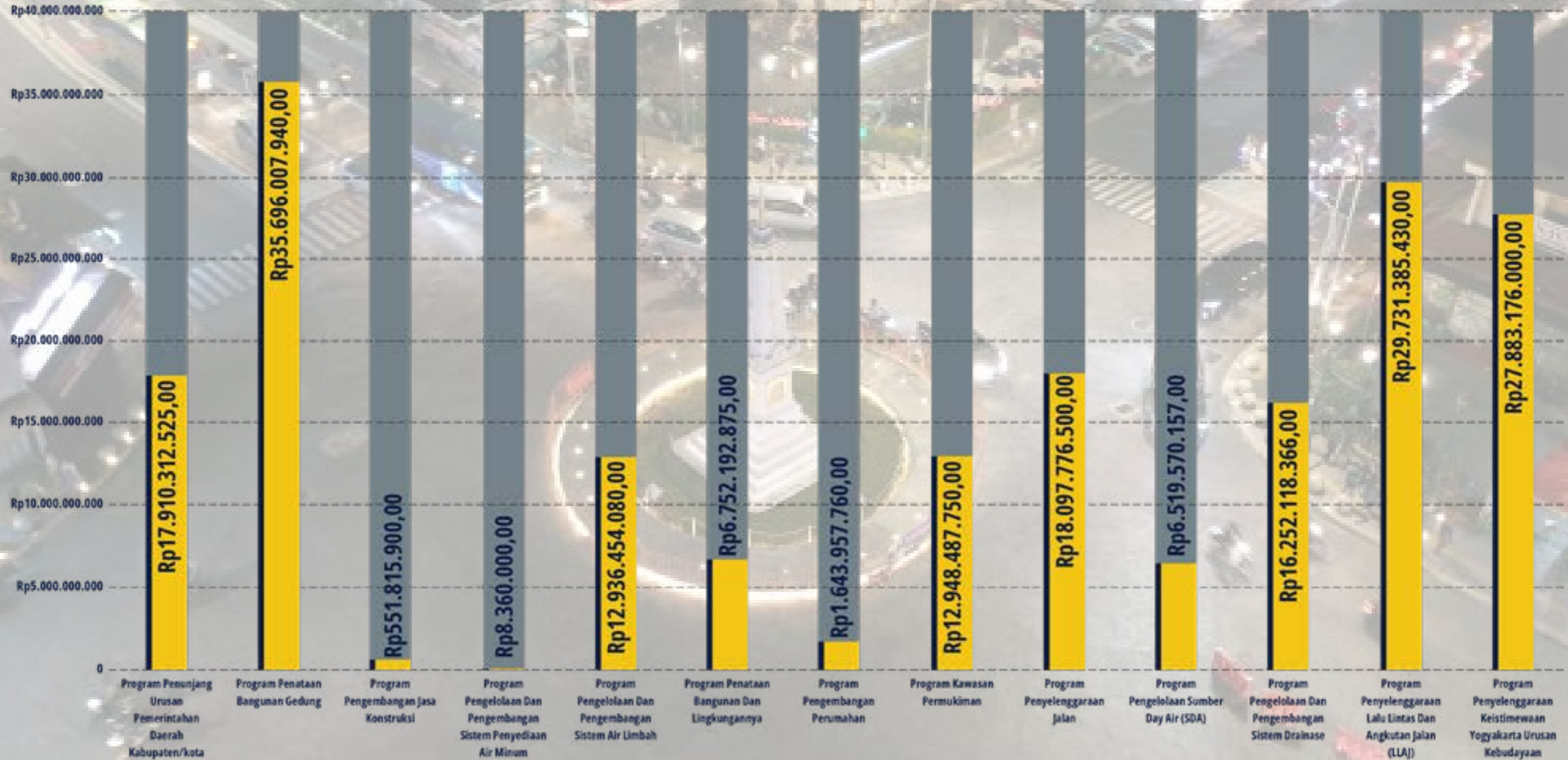
Anggaran belanja pada Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta bersumber dari dana APBD Kota Yogyakarta **Rp186.931.615.283,00** (Seratus delapan puluh enam milyar sembilan ratus tiga puluh satu juta enam ratus lima belas ribu dua ratus delapan puluh tiga rupiah)



No.	Program	Anggaran Belanja	%
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	Rp17.910.312.525,00	9,581%
2.	Program Penataan Bangunan Gedung	Rp35.696.007.940,00	19,096%
3.	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Rp551.815.900,00	0,295%
4.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Rp8.360.000,00	0,004%
5.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Rp12.936.454.080,00	6,920%
6.	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Rp6.752.192.875,00	3,612%
7.	Program Pengembangan Perumahan	Rp1.643.957.760,00	0,879%
8.	Program Kawasan Permukiman	Rp12.948.487.750,00	6,927%
9.	Program Penyelenggaraan Jalan	Rp18.097.776.500,00	9,681%
10.	Program Pengelolaan Sumber Day Air (SDA)	Rp6.519.570.157,00	3,488%
11.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Rp16.252.118.366,00	8,694%
12.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rp29.731.385.430,00	15,905%
13.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Rp27.883.176.000,00	14,916%

53

Rekap Anggaran Belanja DPUPKP 2024 ●●●●●



Sekretariat



Subbagian Umum dan Kepegawaian Subbagian Keuangan

01

Sekretaris

menyelenggarakan **keseekretariatan** Dinas

Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan

melakukan peyelenggaraan **perencanaan, evaluasi, pelaporan** Dinas.

► Peraturan Walikota No 37 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Daerah

Subbagian Umum dan Kepegawaian

melakukan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian, dan evaluasi kegiatan fungsi penunjang di **bidang administrasi umum dan kepegawaian** Dinas.

► Peraturan Walikota No 37 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Daerah

Subbagian Keuangan

melakukan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan fungsi penunjang di **bidang pengelolaan keuangan** Dinas.

► Peraturan Walikota No 37 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Daerah

56



57

Urusan Pemerintah Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Program	Kegiatan	Subkegiatan	Anggaran
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 38.408.000
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp 9.032.400
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Rp 9.032.400
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Rp 8.012.400
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Rp 8.012.400
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp 259.651.890
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 13.992.674.750
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Rp 94.721.900
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp 13.276.100
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 255.882.785
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 123.542.500
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp 2.100.000
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 233.084.000

58

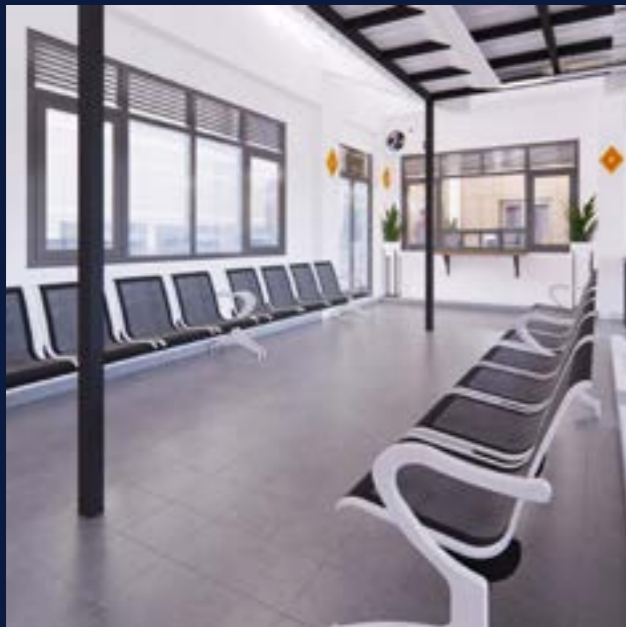
No	Program	Kegiatan	Subkegiatan	Anggaran
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Mebel	Rp 211.750.000
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 123.364.000
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp 25.430.000
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 301.320.000
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 292.108.000
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp 53.818.800
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp 1.279.350.200
			Pemeliharaan Mebel	Rp 15.000.000
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 128.700.000
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp 432.040.000

59





60



61



62



63

Bidang



Penataan Bangunan

02

Bidang Penataan Bangunan //



membantu Kepala Dinas melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi penyelenggaraan **penataan bangunan**.

► Peraturan Walikota No 37 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Daerah





Fungsi

1. pengordinasian perencanaan program kerja Bidang Penataan Bangunan;
2. pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis terkait penataan bangunan;
3. pengordinasian pelaksanaan program kerja Bidang Penataan Bangunan;
4. koordinasi dan sinkronisasi perencanaan bangunan gedung;
5. penyiapan bahan dan penyusunan regulasi terkait bangunan gedung;
6. penyiapan bahan pengaturan jaringan listrik pada bangunan gedung Pemerintah Daerah;
7. penyiapan bahan rekomendasi pemasangan sambungan jaringan listrik pada bangunan gedung Pemerintah Daerah;
8. penyiapan bahan dan penyusunan perencanaan sistem penataan bangunan dan lingkungannya;
9. perencanaan pembangunan gedung Pemerintah Daerah;
10. penyiapan bahan rekomendasi teknis pengadaan barang milik daerah yang membutuhkan detail engineering design yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah/unit kerja;
11. pembangunan dan rehabilitasi bangunan gedung Pemerintah Daerah;
12. bantuan teknis pembangunan dan rehabilitasi sarana penunjang bangunan gedung Pemerintah Daerah;
13. penataan bangunan dan lingkungannya;
14. rehabilitasi bangunan dan lingkungannya;
15. rehabilitasi jaringan listrik pada bangunan gedung Pemerintah Daerah;
16. penanganan kedaruratan kelistrikan pada gedung Pemerintah Daerah;
17. pengoordinasian penyiapan bahan pengaturan jaringan listrik, rekomendasi pemasangan sambungan jaringan listrik, rehabilitasi jaringan listrik dan penanganan kedaruratan kelistrikan pada bangunan gedung Pemerintah Daerah;
18. pengoordinasian penyiapan bahan rekomendasi teknis pengadaan barang milik daerah yang membutuhkan detail engineering design yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah/unit kerja;
19. pengoordinasian pengelolaan data dan informasi pada Bidang Penataan Bangunan;
20. pengoordinasian pengelolaan kearsipan pada Bidang Penataan Bangunan;
21. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Bidang Penataan Bangunan;
22. pengoordinasian pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Bidang Penataan Bangunan;
23. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan program kerja Bidang Penataan Bangunan; dan
24. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Dinas.

▶ Signage Taman Budaya Embung Giwangan yang ikonik



Tampak Depan Taman Budaya Embung Giwangan

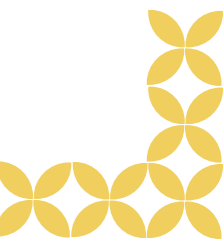


Urusan Pemerintah Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Program	Kegiatan	Subkegiatan	Anggaran
1	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Rp 33.422.774.790
			Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Rp 1.410.946.150

Urusan Pemerintah Bidang Kebudayaan

No	Program	Kegiatan	Subkegiatan	Anggaran
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Pengelolaan Taman Budaya	Pengelolaan dan Pengembangan Taman Budaya Kabupaten/Kota	Rp 27.298.176.000





▲ Pembangunan Taman Budaya Embung Giwangan

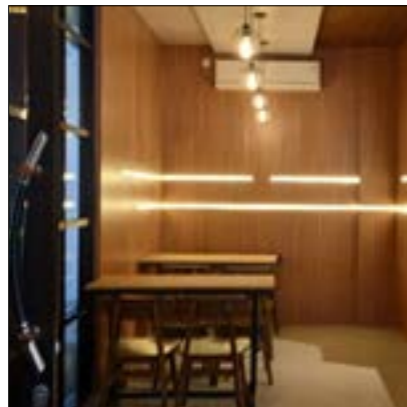
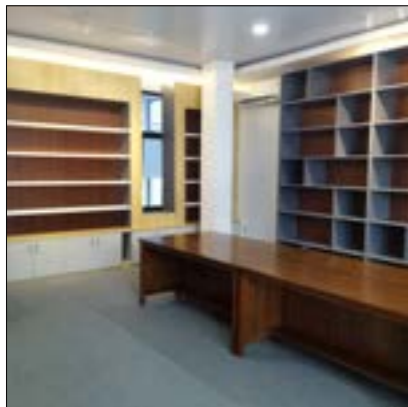
70



71



▲ Revitalisasi Pasar Sentul



72

73



◀ Renovasi Gedung DPRD Kota Yogyakarta



Pembangunan Kantor Kelurahan Purbayan





Pembangunan Kantor Kemantren Gondomanan

Bidang



Pengendalian Bangunan dan Pembinaan Jasa Konstruksi

03

Bidang Pengendalian Bangunan dan Pembinaan Jasa Konstruksi //

membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengendalian bangunan dan pembinaan jasa konstruksi.

► Peraturan Walikota No 37 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Daerah

78



79





Fungsi

1. pengoordinasian perencanaan program kerja pada Bidang Pengendalian Bangunan dan Pembinaan Jasa Konstruksi;
2. pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis terkait pengendalian bangunan dan pembinaan jasa konstruksi;
3. pengoordinasian pelaksanaan program kerja pada Bidang Pengendalian Bangunan dan Pembinaan Jasa Konstruksi;
4. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pengendalian bangunan;
5. pengendalian dan pengawasan bangunan;
6. penilaian kelaikan bangunan gedung;
7. pengawasan bangunan dan bangunan gedung yang berizin;
8. pendataan bangunan gedung;
9. pengelolaan sistem informasi manajemen bangunan gedung;
10. pemberian rekomendasi teknis terkait dengan pelayanan perizinan dan/atau non perizinan di bidang pengendalian bangunan gedung;
11. penyiapan bahan penetapan retribusi perizinan dan/atau non perizinan bangunan gedung;
12. melakukan penyiapan bahan keputusan keringanan pembayaran retribusi perizinan dan/atau non perizinan bangunan gedung;
13. melaksanakan pengelolaan sistem informasi manajemen perizinan dan/atau non perizinan bangunan gedung;
14. pembinaan dan pengembangan jasa konstruksi;
15. pengawasan usaha jasa konstruksi;
16. fasilitasi pengembangan kapasitas tenaga terampil konstruksi;
17. pengelolaan sistem informasi manajemen jasa konstruksi;
18. pelayanan perizinan dan/atau non perizinan di bidang jasa konstruksi;
19. pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan perizinan dan/atau non perizinan di bidang pengendalian bangunan dan pembinaan jasa konstruksi;
20. pengoordinasian pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pada Bidang Pengendalian Bangunan dan Pembinaan Jasa Konstruksi;
21. pengoordinasian pengelolaan kearsipan pada Bidang Pengendalian Bangunan dan Pembinaan Jasa Konstruksi;
22. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Bidang Pengendalian Bangunan dan Pembinaan Jasa Konstruksi;
23. pengoordinasian pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Bidang Pengendalian Bangunan dan Pembinaan Jasa Konstruksi;
24. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan program kerja pada Bidang Pengendalian Bangunan dan Pembinaan Jasa Konstruksi; dan
25. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Dinas.

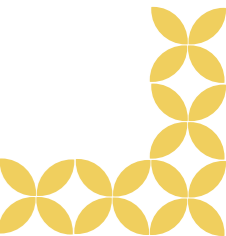


Forum Dinas Pekerjaan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023



Urusan Pemerintah Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Program	Kegiatan	Subkegiatan	Anggaran
1	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik dan Pendataan Bangunan Gedung Melalui SIMBG.	Rp 862.287.000
2	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Rp 120.000.000
			Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi	Rp 79.709.900
			Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi, atau Analis	Rp 106.950.000
			Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp 157.860.000
			Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Rp 87.296.000





(1-2) Kegiatan pengecekan lokasi permohonan PBG/SLF; (3) Konsultasi dengan Tim Profesi Ahli tentang permohonan PBG/SLF; (4) Pelayanan konsultasi dengan petugas PBG/SLF.



▶ Pelatihan dan Uji Sertifikasi Pelaksana Lapangan Pekerjaan Drainase



▶ Pelatihan dan Uji Sertifikasi Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung



▶ Pelatihan dan Uji Sertifikasi Mandor Konstruksi



▶ Apel Swakelola Dinas PUPKP Kota Yogyakarta

Bidang



Perumahan dan Kawasan Permukiman

04

Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman //

membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi penyelenggaraan **penataan perumahan dan kawasan permukiman**

► Peraturan Walikota No 37 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Daerah





Fungsi

1. pengoordinasian perencanaan program kerja pada Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
2. pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis terkait penataan perumahan dan kawasan permukiman;
3. pengoordinasian pelaksanaan program kerja pada Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
4. penataan perumahan dan permukiman;
5. pembinaan infrastruktur perumahan;
6. penyiapan bahan dan penyusunan rekomendasi teknis terkait dengan pelayanan perizinan dan/atau non perizinan di bidang perumahan dan kawasan permukiman;
7. perbaikan rumah tidak layak huni;
8. perencanaan pencegahan lingkungan permukiman kumuh;
9. pembangunan dan pengembangan infrastruktur permukiman;
10. pembangunan dan rehabilitasi sistem pengelolaan air limbah domestik;
11. pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur kawasan permukiman;
12. pembinaan sistem penyediaan air minum yang dikelola perusahaan daerah air minum;
13. pengembangan, pembangunan, dan pembinaan sistem penyediaan air minum berbasis masyarakat;
14. pembinaan penyelenggaraan tempat pemakaman;
15. penyiapan bahan rekomendasi teknis perizinan tempat pemakaman, pengelolaan krematorium dan tempat penyimpanan abu jenazah milik swasta;
16. pembinaan dan pengawasan pengelolaan krematorium dan tempat penyimpanan abu jenazah milik swasta;
17. pengoordinasian pemberian rekomendasi teknis terkait dengan pelayanan perizinan dan/atau non perizinan di bidang perumahan dan kawasan permukiman;
18. pengoordinasian pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pada Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
19. pengoordinasian pengelolaan kearsipan pada Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
20. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
21. pengoordinasian pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
22. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan program kerja pada Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan
23. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Dinas.



Suasana Peresmian Pendopo Gajahwong Kampung Sambirejo, Kel. Prenggan

Urusan Pemerintah Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Program	Kegiatan	Subkegiatan	Anggaran
1	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Rp 8.360.000
2	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	Rp 929.000.000
			Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	Rp 7.578.200.000
3	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Rp 6.382.192.875
			Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Rp 370.000.000

92

Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

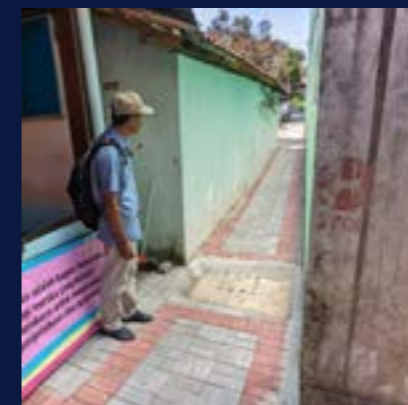
No	Program	Kegiatan	Subkegiatan	Anggaran
1	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Rp 97.300.000
2	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Rp 10.460.830.750
			Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	Rp 2.487.657.000

Urusan Pemerintah Bidang Kebudayaan

No	Program	Kegiatan	Subkegiatan	Anggaran
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya	Rp 585.000.000



93





◀ Rehabilitasi Sanitasi Kawasan Kraton Kelurahan Patehan



▶ Rehabilitasi Sanitasi Kawasan Kraton Kelurahan Kadipaten ◀



Before



After



Before



After



Peningkatan Kualitas dan Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Lingkungan Permukiman Kumuh **Kelurahan Klitren RW.05** ▲



Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Lingkungan Permukiman Kumuh **Kelurahan Prawirodirjan** ▼



Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Lingkungan Permukiman Kumuh **Kelurahan Pakuncen RW.08** ▲

Bidang



Jalan dan Jembatan

05

membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi penyelenggaraan **jalan dan jembatan**.

► Peraturan Walikota No 37 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Daerah

98



99



Fungsi

1. pengoordinasian perencanaan program kerja pada Bidang Jalan dan Jembatan;
2. pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis terkait penyelenggaraan jalan dan jembatan;
3. pengoordinasian pelaksanaan program kerja pada Bidang Jalan dan Jembatan;
4. penyelenggaraan kegiatan peningkatan jalan dan jembatan;
5. penyelenggaraan kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan;
6. pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan perizinan dan/atau non perizinan di bidang jalan dan jembatan;
7. pengoordinasian pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pada Bidang Jalan dan Jembatan;
8. pengoordinasian pengelolaan kearsipan pada Bidang Jalan dan Jembatan;
9. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Bidang Jalan dan Jembatan;
10. pengoordinasian pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Bidang Jalan dan Jembatan;
11. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan program kerja pada Bidang Jalan dan Jembatan; dan
12. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Dinas.

100



101

Jalan Gedongkuning



Urusan Pemerintah Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Program	Kegiatan	Subkegiatan	Anggaran
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Berkala Jalan	Rp 9.856.201.000
			Pemeliharaan Rutin Jembatan	Rp 776.695.000
			Pemeliharaan Rutin Jalan	Rp 7.464.880.500



◀ Pemeliharaan Jalan Balirejo

104

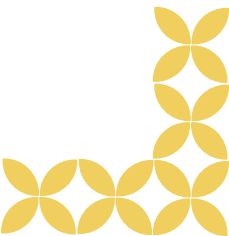
Pemeliharaan Jalan Bener ▶



105



◀ Pemeliharaan Jalan Gedongkuning



Bidang



Sumber Daya Air dan Drainase

06



membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan fasilitasi penyelenggaraan pengelolaan sumber daya air dan sistem drainase.

► Peraturan Walikota No 37 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Daerah



106



107

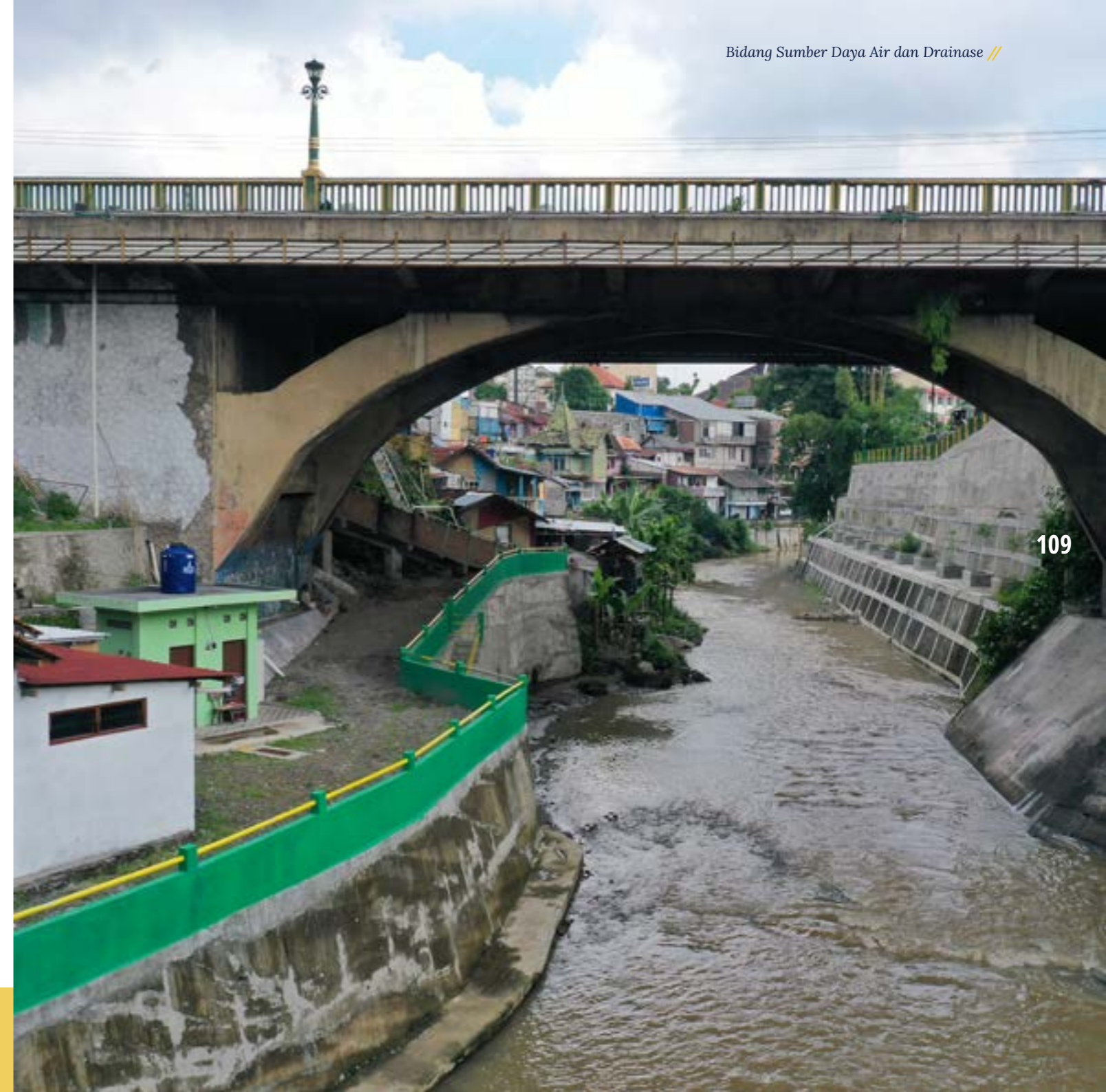


Fungsi

1. pengoordinasian perencanaan program kerja pada Bidang Sumber Daya Air dan Drainase;
2. pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis terkait pengelolaan sumber daya air dan drainase;
3. pengoordinasian pelaksanaan program kegiatan pada Bidang Sumber Daya Air dan Drainase;
4. peningkatan dan pembangunan infrastruktur sumber daya air dan drainase;
5. pembangunan dan peningkatan sistem irigasi primer dan sekunder;
6. pembangunan dan peningkatan sistem drainase;
7. pemberian rekomendasi teknis terkait dengan pelayanan perizinan dan/atau non perizinan di bidang sumber daya air dan drainase;
8. melaksanakan pemeliharaan infrastruktur sumber daya air dan drainase;
9. melaksanakan pemeliharaan dan rehabilitasi sistem irigasi primer dan sekunder;
10. melaksanakan pemeliharaan dan rehabilitasi sistem drainase;
11. pengoordinasian pelayanan perizinan dan/atau non perizinan di bidang sumber daya air dan drainase;
12. pengoordinasian pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pada Bidang Sumber Daya Air dan Drainase;
13. pengoordinasian pengelolaan kearsipan pada Bidang Sumber Daya Air dan Drainase;
14. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Bidang Sumber Daya Air dan Drainase;
15. pengoordinasian pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Bidang Sumber Daya Air dan Drainase;
16. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan program kerja pada Bidang Sumber Daya Air dan Drainase; dan
17. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Dinas.

108

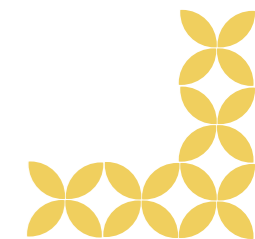
109





Urusan Pemerintah Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Program	Kegiatan	Subkegiatan	Anggaran
1	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAY AIR (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Rp 1.745.588.808
			Rehabilitasi Tanggul Sungai	Rp 3.680.530.000
		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Rp 1.093.453.349
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Sistem Drainase Perkotaan	Rp 11.499.996.000
			Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	Rp 4.752.122.366





▼ Pembangunan Talud
Kelurahan Pakuncen



113



112

◀ Rehabilitasi Talud
Sungai Winongo Kel.
Pringgokusuman



Unit Pelaksana Teknis



Pengelolaan Air Limbah

08



UPT Pengelolaan Air Limbah adalah unit pelaksana teknis untuk menunjang operasional Dinas dalam dalam pengelolaan air limbah

► Peraturan Walikota Yogyakarta No 98 Tahun 2016

114



115





Fungsi

116

1. Penyusunan perencanaan kegiatan UPT
2. Penyusunan perencanaan kegiatan UPT
3. Penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan ketugasan UPT
4. Pelayanan pengelolaan air limbah
5. Pelaksanaan operasional dan pemeliharaan sarana prasarana pengelolaan air limbah;
6. Pengoordinasian penyelenggaraan ketatausahaan UPT
7. Pengoordinasian pengelolaan data dan informasi UPT

Urusan Pemerintah Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Program	Kegiatan	Subkegiatan	Anggaran
1	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Rp4.429.254.080



117

KENDARAAN

NO	JENIS OBJEK DAN PEMANFAATANNYA	TARIF (Rp)	SATUAN
1	Mobil tangki air kapasitas 5.000 lt	840.000	per pengisian
2	Mobil tangki air kapasitas 4.000 lt	710.000	per pengisian
3	Kendaraan tangki tinja kapasitas 4.000 lt	350.000	per sedot
4	Kendaraan tangki tinja kapasitas 1.000 lt	150.000	per sedot
5	Toilet Mobile	600.000	per hari
	Toilet Mobile VIP	850.000	per hari

Perda No 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah



Unit Pelaksana Teknis



Pengelolaan Rusunawa

09

Unit Pelaksana Teknis Rumah Susun yang selanjutnya disingkat UPT Pengelolaan Rumah Susun adalah unsur pelaksana di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu

► Peraturan Walikota Yogyakarta No 36 Tahun 2019



Fungsi

1. Penyusunan perencanaan kegiatan UPT.
2. Penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan ketugasan UPT.
3. Pemungutan dan penyetoran sewa bangunan hunian dan kios sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Pengelolaan fasilitas-fasilitas yang ada pada rusunawa.
5. Pelayanan informasi yang berkaitan dengan pengelolaan rusunawa.
6. Penyelenggaraan pengamanan, kebersihan dan ketertiban terhadap pengguna dan penggunaan fasilitas rusunawa.
7. Pelaksanaan perikatan hukum dengan penyewa fasilitas rusunawa.
8. Pelaksanaan kajian dan telaahan pengembangan serta pemanfaatan kawasan rusunawa.
9. Pendistribusian tugas, sumber daya dan tanggung jawab kepada koordinator Rusunawa Cokrodirjan dan Koordinator Rusunawa Graha Bina Harapan dan koordinator Rusunawa Bener Tegalrejo.
10. Pengkoordinasian penyelenggaraan ketatausahaan UPT.
11. Pengkoordinasian pengelolaan data dan informasi UPT.

120



Rusunawa MBR Bener Tower 1 ▲

Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

No	Program	Kegiatan	Subkegiatan	Anggaran
1	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Rp 1.546.657.760



▲ Kamar Tidur Anak



▲ Kamar Tidur Utama



▲ Kamar Mandi

121

Fasilitas

Rusunawa MBR Bener

Dapur ▼

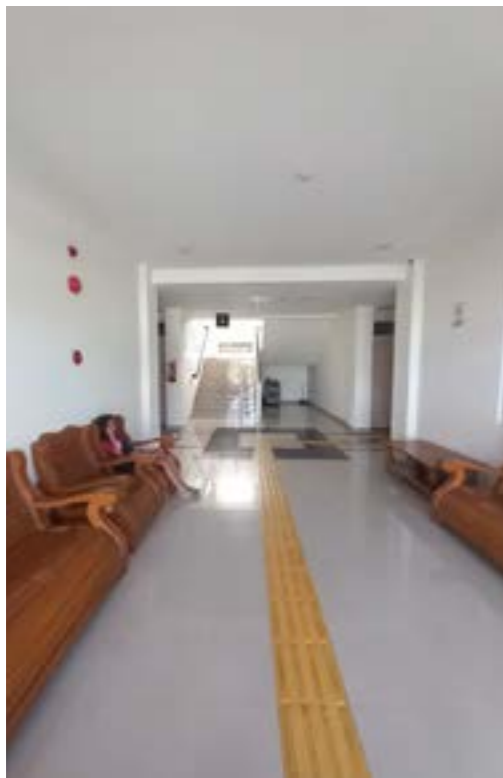


Koridor Rusun Bener 2 ▼



R. Keluarga/R. Makan ▼





Pemanfaatan Rusunawa

NO	JENIS ASET	TARIF (Rp)	SATUAN
A. Rusunawa Cokrodirjan			
1.	Lantai II	255.000	Per bulan
2.	Lantai III	235.000	Per bulan
3.	Lantai IV	215.000	Per bulan
4.	Ruang Usaha 1	140.000	Per bulan
5.	Ruang Usaha 2	180.000	Per bulan
6.	Ruang Usaha 3	200.000	Per bulan
B. Rusunawa Grha Bina Harapan			
1.	Lantai I	100.000	Per bulan
2.	Lantai II	400.000	Per bulan
3.	Lantai III	380.000	Per bulan
4.	Lantai IV	360.000	Per bulan
5.	Lantai V	340.000	Per bulan
6.	Ruang Usaha	650.000	Per bulan
C. Rusunawa MER Bener			
1.	Lantai I	655.000	Per bulan
2.	Lantai II	635.000	Per bulan
3.	Lantai III	615.000	Per bulan
4.	Ruang Usaha	890.000	Per bulan

▲ Perda No 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah



Unit Pelaksana Teknis



Penerangan Jalan Umum

07



UPT Penerangan Jalan Umum adalah unit pelaksana teknis untuk menunjang operasional Dinas dalam pengelolaan penerangan jalan umum.

► Peraturan Walikota Yogyakarta No 91 Tahun 2016



124



125





126

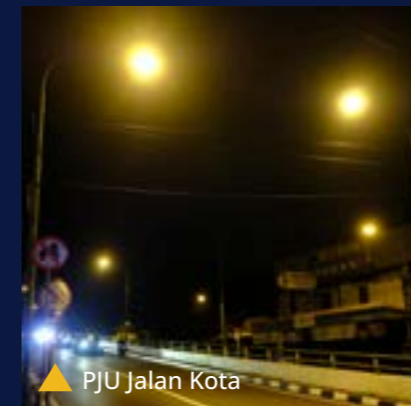
Fungsi

1. Penyusunan perencanaan kegiatan UPT
2. Penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan ketugasan UPT
3. Pelaksanaan peningkatan, pemeliharaan dan perbaikan, serta pemantauan ada lampu penerangan jalan umum, lampu taman, lampu hias dan lampu antik, panel dan jaringan kabel lampu penerangan jalan umum
4. Pelaksanaan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung lampu penerangan jalan umum, lampu taman, lampu hias dan lampu antik, panel dan jaringan kabel lampu penerangan jalan umum
5. Pelaksanaan peningkatan, pemeliharaan dan perbaikan instalasi aksesoris taman kota



Urusan Pemerintah Bidang Perhubungan

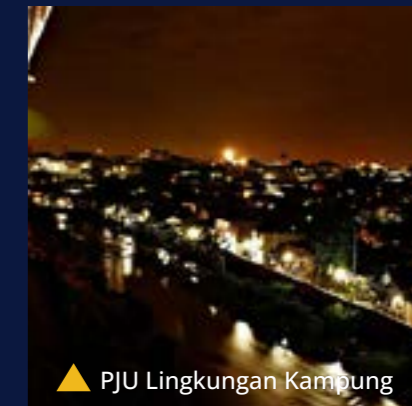
No	Program	Kegiatan	Subkegiatan	Anggaran
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Kabupaten/Kota	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Rp29.731.385.430



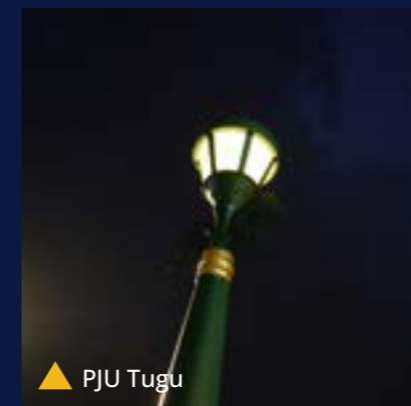
▲ PJU Jalan Kota



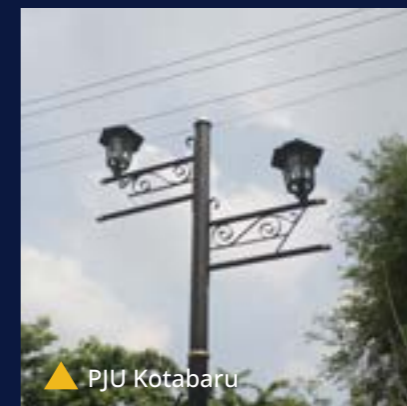
▲ PJU Lingkungan



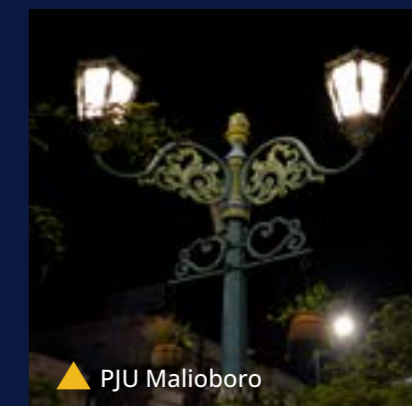
▲ PJU Lingkungan Kampung



▲ PJU Tugu

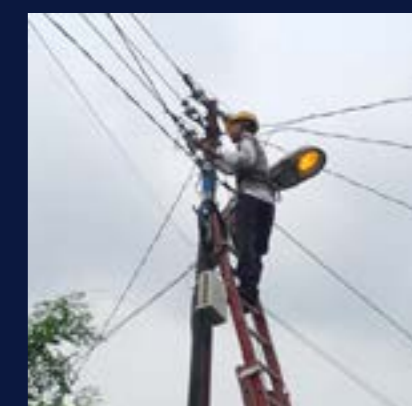


▲ PJU Kotabaru



▲ PJU Malioboro

127





Penutup

Profil Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta merupakan dokumen rangkuman kegiatan pembangunan yang telah dilaksanakan pada tahun 2023 serta gambaran akan pekerjaan 2024. Dengan Buku Profil ini harapannya dapat memberikan gambaran umum dan informasi bagi masyarakat luas serta pelaku/rekanan yang bergerak di bidang pekerjaan umum dan perumahan permukiman.



taman
budaya
EMPUNG GIWANGAN

Pemerintah Kota Yogyakarta
Dinas Pekerjaan Umum
Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kompleks Balai Kota Yogyakarta Jl Kenari No. 56 Yogyakarta Kode Pos: 55165

Telp. (0274) 515867, 686795, 515865, 562682 Fax. (0274) 586795

e-mail puperkim@jogjakota.go.id

Hotline SMS 08122780001, 2740

Hotline e-mail upik@jogjakota.go.id

website pu.jogjakota.go.id

[youtube.com/@dinaspujogjakota](https://www.youtube.com/@dinaspujogjakota)

[instagram.com/dpupjogjakota](https://www.instagram.com/dpupjogjakota)